

Pengaruh Teknologi Society 5.0 Dan Transparansi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Musdalifa¹, Rahma Masdar², Muhammad Din³, Betty⁴, Fikry Karim⁴
Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 09 Juli 2025

Revised: 18 Juli 2025

Accepted: 26 Juli 2025

Keywords:

Akuntabilitas, BPJS Kesehatan, Pelaporan Keuangan, Teknologi Society 5.0, Transparansi Informasi

This is an open-access article under the CC BY license.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada BPJS Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif, dengan responden sebanyak 40 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun secara parsial, hanya variabel transparansi informasi yang berpengaruh signifikan, sedangkan teknologi Society 5.0 tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,513 menunjukkan bahwa kedua variabel independen menjelaskan 51,3% variasi akuntabilitas pelaporan keuangan. Temuan ini menekankan pentingnya penerapan transparansi informasi yang memadai dan keterlibatan teknologi secara optimal dalam mendukung akuntabilitas keuangan di institusi publik.

This study aims to analyze the influence of Society 5.0 technology and information transparency on financial reporting accountability at BPJS Kesehatan throughout Central Sulawesi Province. The research approach used is associative quantitative, with 40 respondents selected through purposive sampling technique. The data analysis technique used multiple linear regression with the help of SPSS. The results of the study indicate that simultaneously, Society 5.0 technology and information transparency have a significant effect on financial reporting accountability. However, partially, only the information transparency variable has a significant effect, while Society 5.0 technology does not show a significant effect. The coefficient of determination (Adjusted R²) of 0.513 indicates that both independent variables explain 51.3% of the variation in financial reporting accountability. This finding emphasizes the importance of implementing adequate information transparency and optimal technology involvement in supporting financial accountability in public institutions.

Corresponding Author:

Musdalifa

Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako,

Jl. Soekarno Hatta No. KM 9, Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

Email: iphamusdalifa06@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, dunia telah memasuki era digital yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0. Masyarakat kini memiliki akses terhadap teknologi canggih seperti robot, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari (Amala, 2024). Perkembangan ini memungkinkan banyak aktivitas kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini dapat diotomatisasi. Seiring dengan hal tersebut, pada Januari 2019, Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan konsep Society 5.0 di World Economic Forum di Davos, Swiss. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang menitikberatkan pada pengembangan teknologi, Society 5.0 berfokus pada manusia sebagai pusat inovasi, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Tahar *et al.*, 2022).

Era Society 5.0 membawa perubahan besar di bidang kesehatan melalui teknologi seperti IoT, AI, big data, dan robotika. Konsep ini tetap berpusat pada manusia dalam memberikan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai lembaga publik perlu bertransformasi, tidak hanya dalam pelayanan medis tetapi juga pengelolaan sumber daya dan sistem pendukung. Sistem keuangan BPJS menjadi komponen penting

yang harus dioptimalkan. Untuk tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi, diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan terintegrasi. Sistem berbasis cloud dengan enkripsi dan analisis data dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan, dan memungkinkan pelaporan keuangan melalui dashboard pelaporan atau akses data real-time. Pendekatan ini sejalan dengan Society 5.0 yang menggabungkan manusia dan teknologi untuk efisiensi operasional dan peningkatan layanan kesehatan (Asri *et al.*, 2024).

Dalam era Society 5.0, Internet of Things (IOT) menggabungkan data baru dan kecerdasan buatan (AI) mengubah sistem yang lebih besar dan kompleks menjadi material yang membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dan mewujudkannya lebih sempurna. Era society 5.0 juga dapat berdampak pada berbagai bidang kehidupan (Inayah *et al.*, 2021). Teknologi sistem informasi yang efektif mampu memberikan alat dan sistem yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efisien. Pemanfaatan optimal teknologi sistem informasi dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan, serta memudahkan akses pada informasi keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan (Zaminaldi, 2024).

Sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 guna mendorong digitalisasi sistem layanan publik. Namun, penerapan teknologi informasi tanpa didukung transparansi belum menjamin tercapainya akuntabilitas. Menurut Atmaja, 2024 Dalam sektor kesehatan, inovasi kecerdasan buatan dapat mempercepat perawatan pasien, memperluas cakupan layanan, serta menekan biaya operasional. Namun, jika tidak dibarengi dengan komitmen transparansi dan pengawasan, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi dan kecurigaan publik.

Dalam sektor publik, penerapan teknologi Society 5.0 berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan transparansi informasi untuk memastikan akuntabilitas kepada publik (Sulfiani & Reski, 2020:10). Transparansi menjadi alat kontrol sosial yang memperkecil asimetri informasi antara lembaga penyedia layanan dan masyarakat. Ketika informasi keuangan disampaikan secara terbuka dan tepat waktu, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola akan meningkat, sebaliknya, ketertutupan dapat memicu keraguan dan ketidakpuasan.

Menurut (Hasyim *et al.*, 2024), Akuntabilitas keuangan daerah adalah mekanisme yang mengatur cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan efektivitas. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan uang daerah sesuai dengan aturan yang berlaku serta menyajikan informasi keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. isu akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik masih menjadi perdebatan panjang. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, praktik di lapangan masih menemui kendala dalam mewujudkan transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan lembaga publik. Samuel Partogi Siahaan, 2022 juga menyoroti bahwa BPJS Kesehatan menghadapi tantangan seperti gagal bayar, defisit anggaran, dan ketidakefisienan pengelolaan dana, yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Permasalahan yang ada di dalam masyarakat dewasa ini adalah kurangnya rasa percaya pada pemerintah dikarenakan maraknya kasus korupsi di Indonesia, mereka takut BPJS Kesehatan tidak memberi pelayanan seperti yang mereka janjikan, ketika masyarakat tertib membayar iuran BPJS Kesehatan namun ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan mereka dipersulit dengan urusan administrasi yang bertele-tele, belum lagi keterbukaan masalah penggunaan dana BPJS Kesehatan kepada masyarakat, untuk menjawab keraguan tersebut maka BPJS Kesehatan perlu adanya transparansi dan akuntabilitas pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan pada masyarakat (Suhita, 2014).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengalami tantangan dari aspek keamanan data. Pada tahun 2021, terjadi kasus peretasan yang melibatkan data 279 juta penduduk Indonesia, yang dijual secara daring. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, menyatakan bahwa meskipun sistem keamanan telah diterapkan sesuai standar, dinamika peretasan yang semakin kompleks tetap menjadi ancaman bagi lembaga ini. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga sempat mengalami kondisi gagal bayar kepada rumah sakit mitra pada tahun 2019 dan 2020, yang disebabkan oleh defisit anggaran mencapai triliunan rupiah (Siahaan, 2022). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik atas kemampuan BPJS dalam mengelola dana peserta secara efisien dan bertanggung jawab. Ketika masyarakat telah tertib membayar iuran,

mereka mengharapkan pelayanan yang setara. Namun, tidak jarang peserta BPJS merasa diperlakukan berbeda dengan pasien umum, baik dari segi waktu tunggu, administrasi, hingga akses layanan (BPJS KESEHATAN, 2020)

BPJS Kesehatan sebagai lembaga publik strategis di Indonesia diharapkan mampu mengelola dana jaminan sosial secara akuntabel dan transparan. Namun, sejumlah permasalahan seperti defisit anggaran, keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, hingga kebocoran data pribadi peserta mengindikasikan lemahnya tata kelola keuangan (Siahaan, 2022). Selain itu, ketimpangan pelayanan antara peserta BPJS dan pasien umum menjadi isu publik yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Meskipun sistem digital seperti Mobile JKN telah diimplementasikan, belum semua teknologi digunakan secara optimal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Dengan melihat urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada BPJS Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem tata kelola keuangan publik yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya di era digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan pengelolaan keuangan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

KAJIAN TEORI

Teknologi Society 5.0

Teknologi 5.0 adalah istilah yang mengacu pada masyarakat yang maju secara teknologi dan berpusat pada manusia (Ridho et al., 2022 : 202). Society 5.0 memiliki makna yang beragam, sebagai konsep yang digerakkan oleh teknologi yang sangat cerdas dan berpusat pada manusia. Society 5.0 tidak hanya memberikan visi untuk memandu strategi sains dan teknologi Jepang, relevansinya meluas ke bidang politik ekonomi maupun pemerintahan. Visi masyarakat yang digambarkan oleh society 5.0 mengharuskan kita untuk memikirkan dua jenis hubungan: hubungan antara teknologi dan masyarakat, serta hubungan yang dimediasi teknologi antara individu dan masyarakat (Hitachi-U Tokyo Laboratory, 2020).

Konsep "Society 5.0" menjelaskan revolusi dalam kehidupan masyarakat. Society 5.0 menjanjikan nilai tambah yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat umum, serta kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan (Ardinata et al., 2022 :34). Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data, ke dalam berbagai aspek kehidupan guna menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks layanan publik, penerapan Society 5.0 diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari teknologi tanpa mengorbankan nilai sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Transparansi Informasi

Sekar dan Sadewa (2024:1076) menyatakan, "Kejernihan informasi, baik dalam hal informasi material maupun proses pengambilan keputusan penting tentang bisnis, dikenal sebagai transparansi. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kesiapan informasi oleh pihak luar ini adalah komitmen untuk menjamin hubungan antara kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi". Transparansi merujuk pada kejelasan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukannya, yaitu masyarakat (Usman & Usman, 2016).

Transparansi dapat diartikan bagaimana sebenarnya publik memiliki kesempatan untuk mendapat informasi mengenai penyelenggaraan suatu organisasi khususnya menyangkut pengelolaan keuangan. Mencapai transparansi publik membutuhkan media informasi yang memungkinkan masyarakat pedesaan mendapatkan data yang tepat dan lengkap, sehingga mereka dapat mengajukan

pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan (Furqan et al., 2023). Menurut prinsip transparansi, organisasi atau badan usaha harus melampirkan data yang relevan sehingga mudah diperoleh dan dipahami. Selain masalah yang diwajibkan oleh hukum, badan usaha ini juga harus diberikan informasi (Sekar & Sadewa, 2024). Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi didasarkan pada kebebasan informasi. Informasi tentang kepentingan publik dapat diperoleh langsung dari mereka yang membutuhkannya.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas berasal dari istilah "accountability" yang mengacu pada kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara dasar, akuntabilitas ialah penyampaian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk pengendalian, terutama dalam mencapai hasil untuk pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2009) dalam akuntabilitas publik, pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang bertanggung jawab kepada pemberi amanah (principal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pihak yang menerima amanah (agen) untuk bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) yang memiliki hak dan kuasa untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2018). Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (Horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab pengelolaan dana kepada atasan atau pihak yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan tanggung jawab penggunaan dana kepada masyarakat luas sebagai pihak pemberi mandat menurut prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Oci et al., 2023).

Teori Agensi

Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu pihak pemberi amanah (principal) dan pihak yang diberi amanah (agent), di mana agent bertindak atas nama principal. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat atau pemerintah bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai agent untuk mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara principal dan agent. Agent memiliki akses informasi yang lebih banyak dan lebih rinci dibandingkan principal, sehingga dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol dan pelaporan yang kuat agar principal dapat mengevaluasi kinerja agent secara objektif.

Transparansi informasi menjadi mekanisme penting dalam teori agensi karena dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak. Keterbukaan informasi membuat principal memiliki akses yang lebih besar terhadap aktivitas dan kondisi keuangan yang dilaporkan oleh agent. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi moral hazard. Teknologi Society 5.0, yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), berperan sebagai alat bantu agent dalam menyusun laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi ini mendukung upaya agent dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan transparan, serta mempermudah principal dalam melakukan pengawasan

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh teknologi dan transparansi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya. Judijanto et al., (2024) meneliti pengaruh teknologi blockchain terhadap efisiensi pelaporan keuangan pada industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain secara signifikan meningkatkan efisiensi proses pelaporan melalui kecepatan pemrosesan, akurasi data, dan kemampuan audit yang lebih baik. Meskipun demikian, penelitian ini belum menyentuh aspek transparansi informasi sebagai variabel pendukung.

Selanjutnya, Kunchahyo & Dharmakarja, (2022) mengkaji pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas, baik secara parsial maupun simultan, meskipun kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa teknologi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, meski belum secara khusus membahas teknologi Society 5.0.

Jauhari & Sulistyowati, (2024) dalam penelitian mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada sektor pemerintahan desa dan belum membahas secara detail mengenai bagaimana transparansi informasi dan teknologi informasi dapat saling mendukung untuk meningkatkan akuntabilitas secara bersamaan, khususnya dalam konteks institusi publik di tingkat nasional atau sektor tertentu seperti BPJS Kesehatan.

Pada penelitian Wardani dan Susilowati (2020) mereka menemukan bahwa transparansi informasi berperan penting sebagai variabel penguat yang bisa memperkuat hubungan negatif antara biaya agensi dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga merupakan komponen penting dalam memelihara efisiensi biaya dan mendorong nilai perusahaan, terutama di sektor korporasi. Meskipun demikian, objek penelitian mereka adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di pasar modal, yang membuat konteks dan pendekatan yang digunakan berbeda dengan sektor layanan publik yang memiliki tanggung jawab sosial yang lebih rumit.

Selanjutnya, Andrini (2023) menghimpun data dari lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yaitu Baznas Kabupaten Kampar, dan menekankan bahwa laporan keuangan di lembaga tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam PSAK No. 109. Situasi ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyajian laporan keuangan masih belum optimal, yang akhirnya berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dananya. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi informasi dan kepatuhan pada standar akuntansi sebagai landasan untuk mencapai akuntabilitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya pada lembaga yang mengelola dana sosial yang bersumber dari kepercayaan publik. Secara keseluruhan, meskipun ketiga studi tersebut membahas aspek yang relevan mengenai akuntabilitas dan transparansi, belum ada yang secara khusus mengkaji sinergi antara teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi dalam menciptakan sistem laporan keuangan yang akuntabel dalam konteks institusi layanan publik seperti BPJS Kesehatan.

Dalam lingkup teknologi Society 5.0, Ardinata et al. (2022) mengkaji peran kepemimpinan transformasional sebagai solusi dalam pengembangan smart city di era Society 5.0. Mereka menemukan bahwa integrasi teknologi dan kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Sementara itu, Amala (2024) meneliti transformasi manajemen pendidikan di era Society 5.0 dan menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembelajaran. Namun, kedua penelitian ini belum menelaah pengaruh langsung teknologi Society 5.0 terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang menyoroti pentingnya interaksi antara pemberi mandat (principal) dan penerima mandat (agent) dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam konteks BPJS Kesehatan, baik masyarakat maupun pemerintah berfungsi sebagai principal, sedangkan BPJS Kesehatan sebagai lembaga pelaksana bertindak sebagai agent yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi menjadi alat krusial yang mampu mengurangi ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak.

Teknologi Society 5.0 yang mencakup penggunaan Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, serta sistem digital terpadu diyakini dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam

proses penyajian laporan keuangan. Di era digital ini, otomatisasi dan integrasi sistem informasi memungkinkan penyusunan laporan yang lebih akurat, real-time, dan terhindar dari manipulasi manual. Dari sudut pandang teori agensi, penerapan teknologi ini dapat memperkuat peranan agent dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan principal, sehingga menambah akuntabilitas laporan keuangan lembaga publik. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Teknologi society 5.0 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa teknologi canggih dari Society 5.0, seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan keuangan. Perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan teori agensi, penggunaan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efektivitas agent dalam melaksanakan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu, sehingga akuntabilitas kepada principal juga meningkat. Menurut Faruqi (2019), teknologi Society 5.0 bertujuan mengintegrasikan AI, IoT, dan big data dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. Penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) memungkinkan proses pelaporan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akurat. Menurut Nur & Hidayat (2024), AI dalam bidang pelayanan publik telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, termasuk dalam sistem keuangan. Hal ini mendukung akuntabilitas karena teknologi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan dan mengurangi kesalahan manusia.

H2: Transparansi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa kepercayaan pemangku kepentingan dapat meningkat jika pelaporan keuangan lebih jelas. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi informasi adalah elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik. Menurut Sriwijayanti (2018), transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam sektor keuangan. Transparansi meminimalkan asimetri informasi antara agent dan principal, sehingga principal dapat lebih mudah mengawasi, menilai, dan memberikan masukan atas kinerja agent. Untuk tata kelola keuangan yang baik, penting untuk menjaga informasi dirahasiakan. Menurut teori akuntabilitas, pertanggungjawaban yang lebih baik dijamin jika informasi keuangan disampaikan dengan lebih terbuka.

H3: Teknologi society 5.0 dan transparansi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Hipotesis ini mengatakan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan akan lebih baik dipengaruhi jika keduanya diukur secara terpisah daripada kombinasi teknologi Society 5.0 dan tingkat transparansi informasi yang tinggi. Kombinasi antara dukungan teknologi dan transparansi akan menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipercaya oleh principal. Ini mendukung tujuan utama teori agensi, yaitu memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Teori sistem mengatakan bahwa efek sinergis dapat terjadi ketika elemen-elemen dalam suatu sistem bekerja sama, yang berarti dalam hal ini bahwa teknologi dan transparansi bekerja sama untuk meningkatkan akuntabilitas. Menurut teori sistem yang dikutip dari Ardinata et al. (2022), integrasi teknologi dengan transparansi informasi dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih akuntabel. Studi oleh Atmaja (2024) menunjukkan bahwa AI dan sistem informasi berbasis big data berkontribusi pada efisiensi pelaporan keuangan, sementara transparansi informasi meningkatkan kepercayaan publik. Teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi bekerja sama untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Teknologi Society 5.0 mendukung penyediaan data yang cepat, tepat, dan relevan, sedangkan transparansi memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan memahami data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana pengaruh Teknologi Society 5.0 dan Transparansi Informasi terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPJS Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sampel penelitian ini terdiri dari 30 orang karyawan di Kantor Cabang (KC) Palu serta masing-masing staf dari kantor BPJS Kesehatan di tiap kabupaten yang memiliki tugas di bidang keuangan. Namun, terdapat tiga instansi (KC Luwuk dan dua kantor kabupaten) yang tidak mengembalikan kuesioner. Oleh karena itu, jumlah akhir responden yang digunakan dalam analisis adalah sebanyak 40 orang.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan ini dilakukan karena tidak semua populasi dalam lingkungan BPJS Kesehatan memiliki pengetahuan atau keterlibatan yang relevan dengan objek penelitian. Kriteria responden dalam penelitian ini mencakup karyawan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki pemahaman atau keterlibatan langsung dalam proses pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan aspek transparansi organisasi. Kemudian responden diarahkan untuk mengisi lembar kuesioner yang berisikan pernyataan dengan penilaian berdasarkan skala likert (skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 5 (Sangat Setuju)). Dengan mencari hubungan variabel dependen dan independen penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan, dan variabel independen adalah Teknologi society 5.0 dan Transparansi informasi. Data dianalisis menggunakan model regresi linear berganda sehingga dapat mengetahui pengaruh antar variabel, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian ini berdasarkan hasil pada pengujian normalitas, multikolinearitas, dan autikorelasi untuk memastikan kelayakan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Demografi

Variabel Demografi	Skala/Kategori	Jenis Skala
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan	Nominal
Usia	< 30 tahun/30-39 tahun/ 40-49 tahun/≥ 50 tahun	Ordinal
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK/D3/S1/S2 atau lebih	Ordinal
Unit Kerja	KC Palu/Kantor Kabupaten poso/ Dst	Nominal
Lama Bekerja	< 1 tahun/1-5 tahun/6-10 tahun/> 10 tahun	Ordinal
Jabatan/Posisi	Staf/Supervisor/Lainnya	Nominal

Sumber: Diolah peneliti 2025

Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Regresi linier berganda dipilih untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, baik secara parsial maupun simultan, terhadap variabel terikat. Model ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis seberapa besar pengaruh teknologi Society 5.0 (X_1) dan transparansi informasi (X_2) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan (Y) pada BPJS Kesehatan. Adapun model umum bentuk persamaan regresi linier berganda, Menurut sugiyono (2013,:293) dapat digunakan gambar berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

keterangan:

- Y = akuntabilitas pelaporan keuangan
- X_1 = teknologi society 5.0
- X_2 = transparansi informasi
- a = konstanta/ intercept
- b_1 - b_5 = koefisien regresi
- e = kesalahan pengganggu (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif penelitian

Hasil analisis deskriptif statistik untuk variabel independen dan variabel dependen berdasarkan jawaban tiap responden pada kuesioner diperoleh hasil pada tabel 2.

Tabel 2. Data Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Teknologi society 5.0	40	20	30	27.75	2.915
Transparansi informasi	40	36	45	41.70	3.082
Akuntabilitas pelaporan keuangan	40	50	60	56.53	2.918
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Diolah dari SPSS,2025

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4, terungkap bahwa variabel Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 56,53, dengan standar deviasi mencapai 2,918. Ini menandakan bahwa pandangan karyawan BPJS Kesehatan tentang akuntabilitas pelaporan keuangan berada pada kategori yang sangat baik dan relatif seragam, karena penyebaran datanya (standar deviasi) cukup kecil.

Selanjutnya, variabel Transparansi Informasi (X2) menunjukkan nilai rata-rata 41,70 dengan standar deviasi 3,082. Hal ini mengindikasikan bahwa para responden umumnya setuju bahwa keterbukaan informasi telah diterapkan dengan baik, meskipun ada sedikit perbedaan pendapat di antara mereka.

Sementara itu, variabel Teknologi Society 5. 0 (X1) memperoleh rata-rata 27,75 dengan standar deviasi 2,915. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berdasarkan konsep Society 5. 0 di dalam BPJS Kesehatan, termasuk sistem digital, AI, dan integrasi informasi, dinilai cukup positif oleh para responden, dengan pandangan yang cenderung konsisten.

Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi serta standar deviasi yang rendah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif dan serupa terhadap penerapan teknologi, transparansi informasi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Sig. = 0,200	Data terdistribusi normal (Sig. > 0,05)
Uji Multikolinearitas	VIF X1 = 1,000, VIF X2 = 1,000	Tidak terjadi multikolinearitas (VIF < 10)
Uji Autokorelasi	Durbin-Watson = 1,790	Tidak terjadi autokorelasi (nilai mendekati 2)

Sumber: Diolah dari SPSS, 2025

Pada tabel 3 uji Asumsi Klasik, Uji normalitas diuji dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa sisa data terdistribusi normal. Ini menandakan bahwa model regresi yang diterapkan telah memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi, sehingga hasil

estimasi dari model tersebut dapat dianggap sah dan tidak terpengaruh oleh bias distribusi data.

Keterkaitan yang kuat antara variabel independen dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi koefisien regresi. Dari hasil pengujian yang dilakukan, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Teknologi Society 5.0 (X1) dan Transparansi Informasi (X2) masing-masing tercatat 1,000. Angka ini jauh di bawah batas 10 yang dijadikan petunjuk adanya multikolinearitas. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tidak ada isu multikolinearitas di antara variabel independen dalam model ini, sehingga setiap variabel independen dapat dipakai untuk secara sah menjelaskan dampaknya terhadap variabel dependen.

Autokorelasi dapat membuat hasil regresi menjadi kurang efisien dan cenderung bias. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Hasil dari pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,790, yang terletak dalam rentang netral (1,5-2,5), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model tersebut. Ini berarti bahwa residual dari model regresi bersifat independen dan tidak menunjukkan pola yang berulang, yang merupakan salah satu kriteria penting dalam analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan tabel Analisis regresi linier berganda, model persamaan yang menunjukkan pengaruh teknologi society 5.0 dan transparansi informasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, adalah sebagai berikut:

$$Y = 1216,070 + 0,356 X_1 + 0,503 X_2 + e$$

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Konstanta)	1216,070	290,585	4,185	0,000
Total_X1	0,356	0,182	1,950	0,059
Total_X2	0,503	0,151	3,327	0,002

Sumber: Diolah dari SPSS, 2025

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan pada tabel 4, didapatkan nilai konstanta (intersep) sebesar 1216,070 yang menunjukkan bahwa jika variabel "Teknologi Society 5.0 (X1)" dan "Transparansi Informasi (X2)" memiliki nilai nol, maka nilai "Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y)" diperkirakan akan sebesar 1216,070. Koefisien regresi untuk X1 adalah 0,356 dengan nilai signifikansi 0,059, yang berarti bahwa secara individual "Teknologi Society 5.0" memiliki pengaruh positif, meskipun masih belum signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, untuk variabel X2, koefisien regresinya tercatat sebesar 0,503 dan nilai signifikansi 0,002, mengindikasikan bahwa "Transparansi Informasi" memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t ditunjukkan pada Tabel 5. Koefisien determinasi berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,513 memperlihatkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh variabel independen (Teknologi Society 5.0 dan Transparansi Informasi) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Pelaporan Keuangan) sebesar 51,3%, sedangkan sisanya sebesar 48,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil uji F simultan memperlihatkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,507 (lebih besar dari F tabel 2,84) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa hipotesis simultan diterima.

Selanjutnya, uji t (parsial) dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Teknologi Society 5.0 memiliki nilai signifikansi 0,059 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial. Sebaliknya, variabel Transparansi Informasi menunjukkan nilai signifikansi 0,002 (< 0,05), yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Dengan demikian, hanya variabel transparansi informasi yang terbukti berpengaruh secara parsial, sedangkan teknologi Society 5.0 hanya berkontribusi dalam pengaruh simultan, tetapi tidak cukup kuat untuk memengaruhi secara individu.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

Statistik	Nilai	Keterangan
R Square	0,538	53,8% variasi Y dijelaskan oleh X1 dan X2
Adjusted R Square	0,513	Disesuaikan dengan jumlah variabel
F Hitung	21,507	> Ftabel (2,84) → Signifikan
Sig. F	0,000	< 0,05 → Hipotesis simultan diterima
Durbin Watson	1,790	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Transparansi Informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Sementara itu, variabel Teknologi Society 5.0 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,059, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan jika diuji secara parsial. Berdasarkan hasil tersebut, maka interpretasi terhadap hipotesis parsial adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) ditolak, artinya Teknologi Society 5.0 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Hipotesis 2 (H2) diterima, artinya Transparansi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Pengaruh Teknologi Society 5.0 Dan Transparansi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Teknologi Society 5.0 dan Transparansi Informasi secara simultan memiliki dampak besar terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, dengan nilai F yang tercatat sebesar 21,507 dan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, Adjusted R Square yang mencapai 0,513 mengindikasikan bahwa 51,3% pergeseran dalam akuntabilitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua faktor ini secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi Society 5.0 tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individu, saat dikombinasikan dengan transparansi informasi, pengaruhnya menjadi sangat penting.

Temuan ini didukung oleh penelitian Judijanto et al. (2024), yang menyoroti bahwa integrasi teknologi seperti blockchain dan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan jika dilengkapi dengan transparansi. Hasil ini juga sejalan dengan pernyataan Kunchahyo dan Dharmakarja (2022), yang mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan dampak positif yang besar jika dilaksanakan secara kolaboratif dan terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan pendapat bahwa penggunaan teknologi modern harus diimbangi dengan komitmen terhadap transparansi yang tinggi agar akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dapat dicapai secara optimal.

Dengan kata lain, untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang bertanggung jawab di BPJS Kesehatan, perlu adanya pendekatan yang terintegrasi antara digitalisasi sistem dan keterbukaan informasi. Penguatan teknologi Society 5.0 seperti big data, kecerdasan buatan, dan aplikasi pelaporan online harus digabungkan dengan regulasi pelaporan yang terbuka, komunikasi internal yang jujur, dan akses publik kepada informasi keuangan. Sinergi antara teknologi dan transparansi menjadi landasan utama dalam mencapai akuntabilitas institusi di era digital.

Pengaruh Teknologi Society 5.0 Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel Teknologi Society 5.0 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,059, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa secara parsial, penerapan teknologi Society 5.0 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, koefisien regresi sebesar 0,356 menunjukkan hubungan positif, di mana peningkatan teknologi tetap memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas meskipun tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi saja tidak cukup untuk memberikan dampak yang signifikan, jika tidak

didukung dengan kesiapan organisasi, pelatihan sumber daya manusia, serta integrasi dengan proses pelaporan yang sudah ada.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardinata et al. (2022) yang menekankan bahwa kemajuan teknologi dalam era Society 5.0 hanya dapat berhasil jika didukung oleh kepemimpinan yang mampu bertransformasi dan adanya sistem yang saling bekerja sama. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Amala (2024) yang mengindikasikan bahwa penegakan teknologi di sektor publik, termasuk di bidang pendidikan, membutuhkan integrasi antara sistem dan sumber daya. Di lingkungan BPJS, meskipun sudah ada teknologi seperti sistem digital dan layanan online melalui Mobile JKN, tingkat penggunaannya masih belum maksimal, baik dari pihak pengguna internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jauhari dan Sulistyowati (2024) menyatakan bahwa teknologi hanya akan berfungsi dengan baik jika ada partisipasi dan pemahaman yang cukup dari para pegawai publik.

Pengaruh Transparansi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Variabel transparansi informasi memiliki dampak yang besar terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi mencapai 0,503. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi informasi yang diberikan oleh lembaga, semakin besar akuntabilitas yang bisa dicapai. Temuan ini konsisten dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pihak pemberi mandat (principal) dan pelaksana (agen) adalah melalui informasi yang terbuka dan jelas. Dalam konteks BPJS, karyawan serta pengelola keuangan berperan penting dalam menyajikan informasi keuangan dengan akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil ini mendukung penelitian Andrini (2023) yang menemukan bahwa kurangnya transparansi informasi berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat dan infak. Penelitian oleh Wardani dan Susilowati (2020) juga menegaskan bahwa transparansi informasi dapat memperlambat hubungan antara biaya agensi dan nilai lembaga, menunjukkan bahwa lembaga yang terbuka cenderung lebih akuntabel dan dapat dipercaya. Di BPJS Kesehatan, hal ini terlihat dari kebutuhan akan informasi pelaporan yang transparan, baik dalam laporan digital, rekap keuangan tahunan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengawasan dan penilaian kinerja.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari teknologi Society 5.0 dan transparansi informasi terhadap akuntabilitas dalam laporan keuangan di kalangan pegawai BPJS Kesehatan di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi secara signifikan secara bersamaan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perpaduan antara inovasi teknologi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam mendorong penciptaan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara parsial, hanya transparansi informasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas, sementara teknologi Society 5.0 tidak menunjukkan pengaruh yang nyata meski memberikan dampak positif. Ini mengisyaratkan bahwa transparansi yang mencakup akses yang jelas terhadap informasi keuangan, kemudahan dalam mendapatkan laporan, dan kejelasan dalam pertanggungjawaban publik masih merupakan aspek utama dalam menentukan tingkat akuntabilitas di institusi publik seperti BPJS Kesehatan. Pengaruh rendah dari teknologi secara terpisah mungkin disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan teknologi atau kurangnya pelatihan serta kesiapan sumber daya manusia untuk mengatur sistem digital secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga memerlukan komitmen tinggi terhadap transparansi serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu memperbaiki pelatihan internal mengenai penggunaan

teknologi informasi yang mendukung laporan, serta memperkuat sistem keterbukaan informasi keuangan lewat platform digital yang dapat diakses oleh publik. Saran untuk penelitian mendatang adalah untuk memperluas fokus variabel dengan memasukkan faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan etika profesional yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Di samping itu, pemilihan responden dapat lebih diarahkan ke unit atau divisi yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat tentang proses akuntabilitas yang berlangsung di lapangan.

REFERENSI

- Amala, R. (2024). Transformasi Manajemen Pendidikan Di Era Society 5.0: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran.
- Andrini, R. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 115–126. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V6i1.1269>
- Ardinata, R. P., Rahmat, H. K., Andres, F. S., & Waryono, W. (2022). Kepemimpinan Transformasional Sebagai Solusi Pengembangan Konsep Smart City Menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur. 1(1).
- Asri, A., Siregar, N. A. N., Liza, S., & Hidayatullah, R. (2024). Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0. 2.
- Atmaja, S. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 9–21. <https://doi.org/10.47080/Jmb.V6i1.3233>
- Faruqi, U. A. (2019). Survey Paper: Future Service In Industry 5.0.
- Furqan, A. C., Kahar, A., Masdar, R., Andriana, C., Rahmaniya, F., & Risma, R. (2023). Mechanism Of Incentives And Accountability In Rural Institutions: Regional Context In Global Dimensions Of Sdgs. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2259274>
- Hasyim, W., Pattawe, A., Din, M., Furqan, A. C., & Megawati, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 587–601. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.10394>
- Hitachi-Utoko Laboratory (H-Utoko Lab.) (Ed.). (2020). *Society 5.0: A People-Centric Super-Smart Society*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4>
- Inayah, K., Farika, E. Y. N., Nurronia, A., & Hanik, E. U. (2021). Pengembangan Digital School System Dalam Menghadapi Era Society 5.0 Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (Sikl). 1.
- Jauhari, R. M., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas. 3(7).
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., Bakri, A. A., Susanto, E., & Kalsum, U. (2024). Pengaruh Peran Teknologi Blockchain Terhadap Efisiensi Proses Pelaporan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada Industri Perbankan Di Indonesia. 2.
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/Akuntansiku.V1i4.316>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (4 Ed.). Andi Offset.
- Nur, A., & Hidayat, M. F. N. (T.T.). Implementasi Kecerdasan Buatan Untuk Meningkatkan Operasional Perusahaan Di Bidang Pelayanan.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Peayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Ridho, A., Wardhana, K. E., Yuliana, A. S., Qolby, I. N., & Zalwana, Z. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Teknologi Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Educasia: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 7, 195–213. <https://doi.org/10.21462/Educasia.V7i3.131>
- Samuel Partogi Siahaan. (2022). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Bpjs Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas. *Jurist-Diction*, 5(5), 1941–1968. <https://doi.org/10.20473/Jd.V5i5.38559>
- Sekar, L., & Sadewa, P. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1069–1090. <https://doi.org/10.62237/Jna.V1i3.126>
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi

- Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd. 1.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabeta.
- Suhita, D. (2014). Transparansi, Akuntabilitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Surakarta. 26.
- Sulfiani, A. N., & Reski, K. (2020a). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo.
- Sulfiani, A. N., & Reski, K. (2020b). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo.
- Tahar, A., Setiadi, P. B., & Rahayu, S. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. 6.
- Usman, N. N., & Usman, J. (2016). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar. 2.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/Jam.V12i1.2289>
- Zaminaldi, D. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Xyz.